

ARSIP DIGITAL DAN MEMORI KOLEKTIF SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM PELESTARIAN SEJARAH TIONGHOA DI INDONESIA

Alexander Raymon^{1(a)}, Nina Witasari^{2(b)}

^{1,2}Magister Kajian Sejarah, Universitas Negeri Semarang

^{a)}medialenterakebajikan@students.unnes.ac.id, ^{b)}ninawitasari@mail.unnes.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

27-01-2026

Diterbitkan Online:

31-03-2026

Kata Kunci:

Arsip Digital, Memori Kolektif, Ruang Publik, Layanan Publik Digital, Sejarah Tionghoa Indonesia

Keywords:

Digital Archives, Collective Memory, Public Sphere, Digital Public Services, Chinese Indonesian History

Corresponding Author:

medialenterakebajikan@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji arsip digital dan memori kolektif dalam pelestarian sejarah komunitas Tionghoa di Indonesia. Selama periode kolonial hingga Orde Baru, sejarah Tionghoa mengalami marginalisasi akibat kebijakan diskriminatif dan keterbatasan akses terhadap arsip resmi negara, sehingga tersisih dari historiografi nasional. Pascareformasi, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi negara, lembaga publik, dan masyarakat sipil untuk merekonstruksi, mengelola, dan mendiseminasikan arsip sejarah secara lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik terhadap arsip digital, museum, komunitas, proyek digitalisasi naskah, serta platform daring yang berperan dalam pelestarian memori kolektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa arsip digital berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan partisipasi masyarakat, dialog antargenerasi, dan rekonsiliasi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan tata kelola administrasi arsip digital yang terbuka untuk mendukung historiografi yang plural dan keikutsertaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, dan organisasi berbasis komunitas untuk menjamin keberlanjutan memori kolektif di era transformasi digital.

ABSTRACT

This study examines digital archives and collective memory in preserving the history of the Chinese community in Indonesia. From the colonial period through the New Order era, Chinese history experienced marginalization due to discriminatory policies and limited access to official state archives, hence being excluded from national historiography. In the Post-Reformation period, digital technology has opened new opportunities for the state, public institutions, and civil society to reconstruct, manage, and disseminate historical archives in a more inclusive manner. This research uses a descriptive qualitative approach with thematic analysis of digital archives, museums, community initiatives, manuscript digitization projects, and online platforms that play a role in preserving collective memory. The findings indicate that digital archives function as a public sphere that enables community participation, intergenerational dialogue, and reconciliation. The implications of this study highlight the importance of open digital archiving policies within public administration to ensure pluralistic historiography and public participation. This research recommends strengthening collaboration between government institutions, academic centers, and

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i1.356>

PENDAHULUAN

Komunitas Tionghoa di Indonesia adalah salah satu kelompok etnis dengan sejarah panjang yang penuh dinamika, kontribusi, sekaligus pengalaman diskriminasi. Sejak era kolonial, Belanda menempatkan mereka dalam kategori hukum *vreemde oosterlingen* (Orang Timur Asing), yang menciptakan jarak sosial dengan bumiputera maupun Eropa dan melanggengkan stigma yang berlangsung lama (Suryadinata, 2010). Konstruksi diskriminatif ini berimplikasi pada historiografi Indonesia yang cenderung indonesiasentris, di mana pengalaman etnis Tionghoa sering kali absen atau dipinggirkan. Kritik terhadap historiografi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Purwanto, menegaskan perlunya historisisme baru yang lebih inklusif, dengan memberi ruang bagi narasi minoritas dan pengalaman sehari-hari (Purwanto, 2006).

Dalam politik kebangsaan, komunitas Tionghoa memiliki rekam jejak yang kompleks. Pada masa kolonial, muncul organisasi seperti *Chung Hwa Hui* (CHH) yang cenderung kolaboratif dengan pemerintah kolonial, serta Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berorientasi nasionalis (Pratama, 2016; Suryadinata, 1994). Di era Orde Lama, Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) berjuang untuk kesetaraan, namun pasca-1965 organisasi ini dibubarkan dan masyarakat Tionghoa kembali menjadi sasaran stigma politik (Coppel, 1994). Masa Orde Baru menandai fase paling represif dengan berbagai regulasi diskriminatif, mulai dari Instruksi Presiden No. 14/1967 hingga kewajiban Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), yang makin mengasingkan narasi sejarah Tionghoa dari ruang publik (Setiono, 2008).

Reformasi 1998 membawa perubahan besar. Regulasi diskriminatif dicabut, kebebasan berekspresi dipulihkan, dan representasi Tionghoa mulai masuk kembali ke dalam wacana nasional (Kuntjara & Hoon, 2020). Perubahan ini tercermin dalam kurikulum pendidikan sejarah yang mulai menyebutkan kembali kontribusi etnis Tionghoa, meski masih

terbatas dan penuh problem representasi (Adam, 2024a). Upaya rekonstruksi sejarah juga hadir melalui ruang-ruang alternatif seperti museum komunitas dan arsip digital. Inisiatif seperti Museum Benteng Heritage, Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, serta komunitas daring NGGOTIO memperlihatkan peran vital masyarakat sipil dalam menghidupkan kembali memori kolektif (Bunari Bunari et al., 2025).

Kehadiran arsip digital menandai fase baru dalam pelestarian sejarah. Dalam penelitian mengenai efektivitas sistem kearsipan digital, Reviandani (2023) menekankan bahwa desain sistem, kepuasan pengguna, dan literasi digital sangat menentukan keberhasilan arsip digital (Reviandani et al., 2023). Lebih jauh, kritik ideologis menunjukkan bahwa ketiadaan strategi arsip budaya digital dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menandakan orientasi kebijakan yang terlalu teknokratis dan neoliberal, sehingga dimensi pelestarian memori kolektif terabaikan (Dharmawanputra, 2025). Padahal UNESCO menegaskan bahwa warisan digital adalah bagian dari memori kolektif umat manusia yang harus dijaga oleh institusi pendidikan dan kebudayaan (Lázaro Ortiz & Jiménez de Madariaga, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas digitalisasi arsip dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik (Juniati & Nurdiansyah, 2023; Reviandani et al., 2023), kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek teknis dan manajerial, seperti efektivitas sistem, desain platform, serta efisiensi administrasi. Dimensi sosial-politik dari arsip digital, terutama dalam kaitannya dengan kelompok minoritas dan rekonstruksi memori kolektif, masih jarang dikaji secara mendalam.

Di sisi lain, studi mengenai etnis Tionghoa Indonesia lebih banyak menyoroti historiografi, politik identitas, diskriminasi, dan representasi budaya (Kwartanada, 2020a; Purwanto, 2006; Suryadinata, 2023). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana transformasi digital dalam bidang kearsipan berperan sebagai medium rekonstruksi memori kolektif dan ruang publik

alternatif bagi komunitas Tionghoa pascareformasi. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan digital archiving, memori kolektif, dan administrasi publik dalam konteks etnis Tionghoa Indonesia.

Lebih jauh lagi, penelitian tentang digitalisasi arsip budaya sering kali menempatkan arsip sebagai objek konservasi teknis, bukan sebagai arena negosiasi identitas dan rekonsiliasi historis. Padahal, dalam konteks sejarah marginalisasi Tionghoa Indonesia, arsip digital memiliki potensi politik dan sosial yang signifikan: ia dapat menjadi ruang partisipatif untuk merebut kembali narasi yang sebelumnya disenyapkan oleh kebijakan negara.

Contoh praktik pelestarian dapat dilihat pada upaya dokumentasi dan digitalisasi di Boen Bio (Surabaya) dan Hok An Kiong (Muntilan), yang menyelamatkan halaman literatur dan arsip Tionghoa dari kerusakan (Kaparang et al., 2023; Permatadewi & Gunawan, 2023; Sutrisno & Tumimomor, 2017). Proyek ini selain menyelamatkan dokumen, juga membuka akses generasi muda terhadap sejarah leluhur yang sebelumnya sulit diakses atau bahkan tersembunyi. Inisiatif serupa juga tampak dalam pameran “KONGSI” di Museum Nasional (2025) yang menampilkan akulturasi Tionghoa-Indonesia sejak awal abad pertama hingga masa kemerdekaan, menegaskan peran etnis Tionghoa dalam membentuk identitas Indonesia yang berlapis (Yulianni, 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian Didi Kwartanada menegaskan bahwa studi Tionghoa Indonesia pascareformasi meliputi identitas dan bagaimana komunitas ini mengisi kekosongan narasi sejarah yang sebelumnya ditekan (Kwartanada, 2020a). Upaya ini sejalan dengan tren studi Asia yang semakin menekankan keterhubungan lintas negara, diaspora, dan digitalisasi sebagai strategi pelestarian (Setijadi, 2016; Show & Sai, 2023).

Digitalisasi arsip dalam tata kelola pelayanan publik menjadi sarana teknis pelestarian sekaligus medium kolektif dan rekonsiliasi. Arsip digital berfungsi sebagai jembatan antargenerasi, ruang negosiasi identitas, sekaligus koreksi atas historiografi resmi yang cenderung homogen. Melalui pemanfaatan teknologi digital, komunitas Tionghoa dapat menegaskan kembali kontribusi dan keberadaannya dalam narasi kebangsaan, serta berpartisipasi aktif dalam membangun

identitas Indonesia yang inklusif dan majemuk di era globalisasi sekaligus menjadi sumber penting untuk memahami dinamika identitas dan integrasi mereka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran arsip digital dalam pelestarian memori kolektif komunitas Tionghoa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan interpretatif, khususnya dalam melihat relasi antara digitalisasi arsip, ruang publik, dan identitas kolektif.

Analisis data dalam konteks memori kolektif dilakukan dengan analisis tematik. Prosesnya dimulai dari pengodean narasi dan dokumen untuk menemukan tema-tema utama, seperti pengalaman diskriminasi, kontribusi nasionalisme, trauma kolektif, serta rekonsiliasi identitas. Setelah itu, dilakukan identifikasi pola untuk melihat bagaimana memori komunitas terbentuk dan diwariskan lintas generasi.

Di dalam metode arsip digital, data diperoleh dari berbagai sumber seperti museum komunitas, literatur akademik, proyek digitalisasi naskah, dan pameran virtual. Data dari beragam media ini kemudian diintegrasikan melalui beberapa tahap yaitu digitalisasi dan standarisasi format untuk memastikan keterpaduan; kategorisasi tematik sesuai topik sejarah, budaya, atau politik; korelasi silang antar-sumber untuk meningkatkan validitas; serta integrasi naratif, yaitu menyusun sintesis dari arsip resmi, literatur akademik, dan memori komunitas menjadi historiografi yang lebih inklusif.

Ruang lingkup penelitian mencakup:

1. Museum dan komunitas lokal, seperti Museum Benteng Heritage (Tangerang) dan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa (Tangerang Selatan) yang aktif melakukan pelestarian sejarah melalui arsip digital.
2. Proyek digitalisasi naskah, misalnya koleksi Sino-Melayu di Boen Bio (Surabaya) dan Hok An Kiong (Muntilan) yang didigitalkan oleh Evi Sutrisno bersama Universitas Washington.
3. Platform digital, seperti komunitas daring NGGOTIO dan pameran virtual “KONGSI” di Museum Nasional.
4. Literatur akademik, termasuk karya-karya yang mengulas historiografi kritis (Purwanto, 2006, 2019), kontribusi

Tionghoa dalam nasionalisme Indonesia (Adam, 2024a; Kurniawan et al., 2023; Santosa, 2014), serta tantangan kajian sastra digital (Khaled Benfafa, 2025).

Metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data, dilanjutkan dengan proses analisis kritis. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi multi sumber, yaitu membandingkan data dari arsip digital, literatur akademik, dan dokumentasi komunitas (Nurfajriani et al., 2024). Arsip digital diposisikan sebagai repositori teknis, dan juga sebagai ruang publik, ruang rekonsiliasi identitas, tempat narasi komunitas yang sebelumnya terpinggirkan dapat berdialog dengan historiografi resmi.

Data primer penelitian terdiri dari arsip digital, koleksi museum komunitas, dan hasil digitalisasi naskah Tionghoa-Melayu. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta literatur teoretis mengenai memori kolektif, historiografi, nasionalisme kultural, dan digital humanities.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur akademik terkait, studi dokumentasi, melalui analisis konten arsip digital, koleksi museum, serta dokumen sejarah yang didigitalkan. Studi kasus dilakukan dengan menyoroiti proyek-proyek digitalisasi tertentu sebagai contoh konkret praktik pelestarian memori kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menggambarkan bagaimana memori kolektif komunitas Tionghoa Indonesia terbentuk melalui pengalaman historis yang panjang sekaligus penuh dinamika, serta bagaimana arsip digital berperan sebagai medium baru dalam merekonstruksi dan melestarikan sejarah tersebut. Pembahasan berikut akan menguraikan temuan utama kajian dengan menyoroiti kasus-kasus sejarah penting, representasi dalam literatur maupun arsip, serta integrasi data digital yang membuka ruang rekonsiliasi identitas.

Dalam pembahasan ini, arsip digital dipahami sebagai sistem pengelolaan, distribusi, dan reproduksi memori kolektif berbasis teknologi. Oleh karena itu, karya sastra, testimoni, dan dokumentasi visual yang dikutip tidak dianalisis sebagai objek kajian utama, melainkan sebagai contoh materi kultural yang kemudian masuk ke dalam ekosistem arsip digital dan membentuk ruang publik partisipatif.

Memori Kolektif Tionghoa-Indonesia

Memori kolektif komunitas Tionghoa Indonesia dibangun dari pengalaman panjang yang bertentangan antara kontribusi budaya dan politik dengan diskriminasi struktural. Sejak abad pertama, catatan interaksi awal menunjukkan komunitas Tionghoa telah berakar di Nusantara melalui perdagangan rempah (Go Gien Tjwan, 2020; Liji, 2012). Namun kolonialisme Belanda kemudian mempertegas segregasi sosial melalui kategori pribumi, Eropa, dan *Vreemde Oosterlingen*, yang menempatkan Tionghoa pada posisi ambigu (Suryadinata, 2023).

Keberadaan memori kolektif tersebut juga banyak dipengaruhi oleh literatur dan karya kaum akademis yang menyoroiti posisi etnis Tionghoa dalam sejarah bangsa. Leo Suryadinata, dalam *Prominent Indonesian Chinese* (1995), menegaskan bahwa:

“. . . The Chinese in Indonesia have contributed significantly to the development of the Indonesian nation, yet their role is often neglected in the national historiography.”

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kontribusi Tionghoa kerap diabaikan dalam narasi resmi, sehingga memori kolektif mereka rentan hilang.

Satria Adhitama (2025) menegaskan bahwa bacaan serius mengenai Tionghoa-Indonesia masih sangat terbatas, sehingga literatur yang ada menjadi penting dalam membentuk komunikasi dan kesadaran historis publik (Adhitama, 2025). Minimnya literatur yang membicarakan diskriminasi Tionghoa dalam pendidikan formal memperlihatkan betapa memori kolektif komunitas ini seringkali ditekan atau dihapus dari narasi arus utama (Kwartanada, 2020a).

Soe Hok Gie, dalam *Catatan Seorang Demonstran* (1983), menulis dengan getir:

“. . . Kadang-kadang saya merasa bangsa ini tidak adil kepada orang-orang Tionghoa. Mereka dituduh macam-macam, padahal mereka juga ikut berjuang.”

Narasi tersebut juga dipengaruhi oleh representasi visual dan simbolik di ruang publik. Polemik tentang uang peringatan Rp75.000 tahun 2020, misalnya, memperlihatkan betapa masyarakat masih alergi terhadap simbol-simbol Tionghoa di ruang nasional, seakan keberadaan mereka

masih dianggap “asing”. Hal ini mempertegas perlunya memori kolektif yang lebih jujur dan inklusif, di mana etnis Tionghoa seharusnya tidak diposisikan sebagai liyan, tetapi bagian integral dari bangsa.

Trauma kolektif juga membentuk ingatan bersama. Kebijakan diskriminatif Orde Baru, seperti Inpres No. 14/1967 yang melarang ekspresi budaya Tionghoa, serta peristiwa Mei 1998, menjadi luka sejarah yang membekas (Go Gien Tjwan, 2020; Setiono, 2008). Representasi dalam sastra pasca-1998 menegaskan bagaimana luka sejarah tersebut diolah sebagai strategi pemulihan identitas (Kwartanada, 2016; Sinaga et al., 2024). Alex Cheung, dalam cerpennya *A Tribute for HPK* (Cheung et al., 2021), menggambarkan ketegangan sosial yang menimpa etnis Tionghoa pada masa kerusuhan Mei 1998. Ia menulis:

“ . . . Di tempat yang berbeda, beberapa orang mulai merangsek ruko-ruko tetangganya. Mereka kalap menjarah. Bunyi pintu geser digetok dengan martil atau linggis serta teriakan-teriakan juga terdengar dari arah ruko-ruko para tetangga di sekitar rumahnya.”

Kutipan ini mencerminkan trauma kolektif yang dialami komunitas Tionghoa, di mana kekerasan terhadap mereka bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga secara simbolik menghapus rasa aman dan kebersamaan yang selama ini dibangun. Secara umum, memori kolektif Tionghoa Indonesia tidak hanya berisi ingatan tentang diskriminasi, tetapi juga mengandung semangat perlawanan dan ketangguhan.

Dari hasil wawancara dengan generasi senior di kawasan Pecinan di Jakarta, Seorang anggota komunitas berusia 72 tahun menceritakan pengalaman masa Orde Baru:

“ . . . Di Glodok dulu, setiap Imlek kami harus merayakannya diam-diam. Kalau ada barongsai, itu hanya di dalam gedung, pintu ditutup rapat. Bahkan papan nama toko pun banyak yang diubah agar tidak terlalu ‘kelihatan Tionghoa’.” (wawancara Hendra Fung, Jakarta, September 2023).

Sementara seorang generasi senior berusia 65 tahun mengenang perubahan pascareformasi:

“ . . . Dulu waktu masih muda, kami sering diejek di sekolah dengan sebutan ‘cina’. Rasanya berat sekali. Tapi setelah

Reformasi, keadaan jauh berbeda. Sekarang setiap Cap Go Meh, jalanan penuh orang, bukan hanya warga Tionghoa tapi juga tetangga Betawi dan Sunda ikut merayakan. Itu yang membuat hati lega.” (wawancara Oey Tjin Eng, Tangerang, Mei 2024)

Di sisi lain, generasi muda justru memanfaatkan media sosial untuk menegosiasikan identitas. Salah satu unggahan komunitas daring NGGOTIO menyatakan:

“ . . . Lewat Youtube, kami mencoba mengenalkan sejarah toko-toko Tionghoa lama di Semarang. Bukan hanya soal etnis, tapi tentang bagian dari sejarah kota yang harus diingat bersama.” (Anshori et al., 2022).

Testimoni ini memperlihatkan bagaimana arsip digital berfungsi sebagai ruang partisipatif bagi generasi muda untuk merekonstruksi sejarah secara inklusif.

Arsip Digital sebagai Ruang Rekonsiliasi

Perkembangan arsip digital memungkinkan rekonstruksi sejarah yang sebelumnya disenyapkan. Herman Setyawan (2025) menyatakan bahwa efektivitas sistem arsip digital sangat dipengaruhi oleh desain sistem dan literasi pengguna, bukan hanya infrastruktur teknis. Dalam konteks komunitas Tionghoa Indonesia, digitalisasi tidak hanya menyelamatkan dokumen bersejarah, tetapi juga mengembalikan ruang bagi narasi yang terpinggirkan.

Pameran KONGSI di Museum Nasional (2025) menjadi bukti nyata bagaimana teknologi multimedia digunakan untuk menampilkan sejarah akulturasi Tionghoa Indonesia secara partisipatif. Pameran ini menampilkan artefak, multimedia, hingga karya sastra populer Kho Ping Hoo, sembari menegaskan bahwa etnis Tionghoa telah menjadi bagian integral dari perjalanan kebangsaan (Cholid, 2025). Dalam hal ini, arsip digital berperan sebagai ruang rekonsiliasi: mempertemukan historiografi dominan dengan memori komunitas yang lama diabaikan.

Arsip digital bukan sekadar media teknis, tetapi juga ruang rekonsiliasi identitas. Studi Amirul Ulum (2015) menunjukkan bahwa Perpustakaan Universitas Kristen Petra (UK Petra) aktif mengelola arsip digital dengan program seperti Surabaya Memory, Petra Chronicle, dan Petra Art Gallery. Upaya ini

menunjukkan bagaimana arsip digital tidak hanya menyimpan data akademik, tetapi juga melestarikan memori kota dan komunitas, termasuk kontribusi Tionghoa di Surabaya. Selain itu, Pusat Studi Tionghoa (CCIS) UK Petra berperan penting sebagai forum akademis pertama yang fokus pada isu Tionghoa di Indonesia. CCIS tidak hanya menyelenggarakan seminar dan diskusi, tetapi juga menjembatani missing link identitas yang hilang selama 32 tahun masa Orde Baru (Kuntjara, 2011). Dengan demikian, digitalisasi dan pusat studi semacam ini berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang menghubungkan kembali generasi muda Tionghoa dengan akar sejarah mereka.

Hal serupa terlihat dalam digitalisasi naskah Sino-Melayu di Boen Bio (Surabaya) dan Hok An Kiong (Muntilan). Proyek ini menyelamatkan ribuan halaman literatur yang sempat disembunyikan di masa Orde Baru untuk menghindari penyitaan negara (Sutrisno, 2016). Dengan dibuka kembali melalui arsip digital, dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai artefak, tetapi juga sebagai media dialog lintas generasi.

Selain tantangan teknis dan ideologis, digitalisasi arsip juga membawa persoalan etika. Pertama, ada isu hak cipta dan kepemilikan budaya. Naskah Sino-Melayu atau koleksi komunitas yang didigitalkan sering kali tidak jelas status kepemilikannya; apakah milik komunitas lokal, lembaga akademik, atau institusi asing yang melakukan digitalisasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: siapa yang berhak mengatur akses, menggunakan, atau menginterpretasikan arsip tersebut?

Kedua, terdapat risiko komodifikasi memori kolektif. Ketika arsip digital dipublikasikan di platform terbuka, ada kecenderungan ia direduksi menjadi sekadar konten visual atau informasi instan yang dikonsumsi cepat, terlepas dari konteks sosial dan historisnya. Misalnya, foto-foto perayaan Imlek atau cerita trauma kerusuhan Mei 1998 dapat beredar luas, tetapi kehilangan makna reflektif yang penting bagi komunitas asalnya.

Ketiga, persoalan representasi. Digitalisasi yang dilakukan tanpa keterlibatan komunitas bisa menghasilkan bias baru: arsip dipilih, dikurasi, atau ditafsirkan dari sudut pandang akademisi atau lembaga, bukan dari suara komunitas sendiri. Padahal, etika digitalisasi menuntut adanya partisipasi aktif dari pemilik memori agar proses ini tidak hanya menjadi

bentuk “pengarsipan dari luar”, melainkan juga sarana pemberdayaan dari dalam.

Idealnya, digitalisasi arsip seharusnya dipandang bukan sekadar proyek teknis atau estetis, melainkan juga tanggung jawab moral dan politik. Arsip digital harus tetap menghormati hak cipta, melibatkan komunitas dalam pengelolaan, serta menjaga makna sosial dari dokumen yang didigitalkan agar tidak tereduksi menjadi sekadar konten komersial atau tontonan publik.

Tantangan dan Problematika

Meskipun menjanjikan, arsip digital menghadapi sejumlah tantangan. Isu Tionghoa jarang sekali dibicarakan secara terbuka, bahkan literatur yang membahas diskriminasi etnis ini masih terbilang langka (Fadhila & Adipurwawidjana, 2024; Samtani, 2023). Situasi ini menggambarkan hambatan ideologis yaitu meskipun arsip digital dapat membuka ruang dialog, tetap ada resistensi budaya dalam menerima narasi Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Mengutip Purwanto (2019), Orang Tionghoa tidak pernah benar-benar bisa diterima sebagai Indonesia dan terus menjadi orang asing, walaupun telah menjadi warga negara Indonesia (Purwanto, 2019).

Tantangan teknis menjadi yang utama, berupa keterbatasan infrastruktur dan keterampilan digital. Tanpa literasi digital yang memadai, arsip digital berisiko hanya menjadi repositori pasif yang sulit diakses masyarakat (Dharmawanputra, 2025). Di sisi teknis, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengelolaan arsip digital (Juniati & Nurdiansyah, 2023). Arsip perguruan tinggi seperti di UK Petra memang sudah mengikuti siklus daur hidup arsip, tetapi keterbatasan tenaga ahli menyebabkan sebagian koleksi tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini bisa berimplikasi pada hilangnya jejak sejarah yang berharga, termasuk dokumen komunitas Tionghoa.

Kedua, tantangan ideologis. Dominasi rezim teknokratis dalam kebijakan sejarah di Indonesia menitikberatkan pada industrialisasi dan ekonomi, tetapi minim memberi ruang bagi humaniora. Menurut Raymon (2025), sejarah perlu di-hilirisasi agar lebih aplikatif, dengan tetap bebas kritis, tanpa terjebak pada komodifikasi arsip semata (Kwartanada, 2020b; Raymon, 2025). Dalam konteks ini, digitalisasi

arsip Tionghoa seharusnya dapat menjadi gerakan pendorong dokumentasi kultural.

Ketiga, politik representasi. Narasi tentang Tionghoa masih sering dilekatkan pada dikotomi pribumi–non-pribumi (Adam, 2024b; Suryadinata, 2023), meskipun kontribusi mereka terhadap nasionalisme cukup signifikan, seperti publikasi pertama lagu Indonesia Raya oleh surat kabar *Sin Po* pada 1928 (Goan, 2009). Isu representasi Tionghoa dalam sastra juga menghadapi problem stereotip. Dalam novel *Saman* (1998:97), Ayu Utami menyelipkan karakter etnis Tionghoa yang masih digambarkan sebagai “asing” atau “berbeda” dalam relasi sosial:

“ . . . Ia teringat pula bahwa orang-orang Cina selalu membayar lebih mahal untuk mendapat paspor atau KTP.”

Hal ini menegaskan kritik bahwa meskipun Reformasi membuka ruang kebebasan, namun narasi Tionghoa dalam budaya populer masih kerap diposisikan sebagai liyan.

Keempat, otentisitas arsip. Salinan digital memang meningkatkan akses, tetapi tidak selalu mampu menggantikan nilai material arsip asli (McDougall et al., 2018). Risiko kehilangan konteks fisik menjadi problem serius dalam menjaga integritas sejarah (Bunari Bunari et al., 2025; Kerman, 2006; Khaled Benfafa, 2025).

Peranan pemerintah dalam hal ini menjadi amat penting untuk duduk bersama membangun tata kelola manajemen arsip yang terawat sekaligus membuka akses manfaat bagi masyarakat.

Generasi Muda dan Negosiasi Identitas

Generasi muda Tionghoa Indonesia memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali memori kolektif melalui media digital, seni, dan sastra. Novel-novel Indonesia pasca-1998 banyak merepresentasikan pengalaman Tionghoa dengan cara yang lebih kompleks bukan hanya sebagai korban diskriminasi, tetapi juga sebagai subjek yang kreatif, kuat, dan produktif (Meij, 2009; Pranoto, 1998; Sya'bani et al., 2024).

Sastra pasca-1998 juga berfungsi sebagai arsip kultural yang memperkaya arsip digital. Novel Clara Ng, *Dimsum Terakhir* (2006), menghadirkan narasi keluarga Tionghoa yang berhadapan dengan dilema identitas di Indonesia. Salah satu tokohnya, Siska, pada halaman 235 digambarkan:

“ . . . Sebagai keturunan Cina di Indonesia, ... Siska punya banyak sekali complain kepada pemerintah. Saking banyaknya, jika dibuat list, mungkin ukurannya bisa lebih panjang daripada permintaannya kepada Sinterklas.”

Kutipan ini menunjukkan bagaimana arsip digital yang menghimpun karya sastra juga berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi: menghubungkan pengalaman personal dengan memori kolektif bangsa. Namun di bagian lain Clara menampilkan kutipan yang menegosiasikan identitasnya, simbol generasi muda Tionghoa yang sedang mencari jati diri, sebagaimana terdapat pada halaman 236:

“ . . . orang-orang Cina keturunan di Indonesia tidak pernah mendapat pengakuan... Full pledge citizenship. Menjadi orang Indonesia tanpa embel-embel kata 'keturunan'.”

Kutipan ini menegaskan bahwa generasi muda tidak lagi pasif menerima identitas yang dilekatkan oleh negara atau masyarakat, melainkan aktif merundingkan ulang posisi mereka sebagai warga Indonesia yang setara (Khaled Benfafa, 2025; Kristiono, 2018; Sinaga et al., 2024).

Buku-buku seperti Catatan Seorang Demonstran karya Soe Hok Gie dan *The End of Silence* karya Soe Tjen Marching (Marching, 2017) memberi suara pada pengalaman diskriminasi dan perjuangan Tionghoa dalam sejarah politik Indonesia. Generasi muda Tionghoa Indonesia dapat menjadikan arsip digital dan literatur tersebut sebagai medium untuk menegosiasikan identitas mereka: bukan lagi sebagai etnis minoritas yang terasing, melainkan sebagai bagian dari narasi besar bangsa.

Komunitas digital seperti NGGOTIO memperlihatkan bagaimana generasi muda Tionghoa menggunakan media sosial untuk mendiskusikan sejarah, identitas, dan pengalaman diaspora. Generasi diaspora yang lebih muda cenderung “mengonsumsi sejarah”, untuk itu perlu dilakukan manajemen memori kolektif agar dapat mengolahnya menjadi inspirasi untuk tindakan kreatif di era digital. Perlu dicatat juga CCIS UK Petra yang secara aktif menggelar seri webinar CasCisCus via Zoom dengan beberapa tajuk pembahasan seperti “Perluah Anak-anak Tionghoa Belajar Bahasa Mandarin?”, “Cerita Silat Tionghoa

sebagai Media Akulturasi”, dan lainnya. Kegiatan yang dilakukan terutama selama masa pandemi melalui ruang pertemuan digital semacam ini memperlihatkan bagaimana generasi muda tidak hanya berusaha mengingat, tetapi juga mengolah sejarah sebagai bagian dari identitas mereka di Indonesia.

Studi Kasus: NGGOTIO dan @tionghoaindonesia

Dalam perspektif ruang publik digital, desain interaktif dan partisipatif mencerminkan transformasi dari ruang publik berbasis ruang fisik menuju ruang publik berjejaring yang dimediasi algoritma platform alias infrastruktur yang digunakan.

Selain museum, komunitas dan proyek digitalisasi naskah, komunitas Tionghoa Indonesia juga aktif membangun memori kolektif melalui platform digital. Tentu saja kegiatan ini tidak untuk mengecilkan peranan satu sama lain, melainkan justru saling mengisi keterbatasan masing-masing. Museum bisa tetap menjalankan fungsi konservasi dan edukasinya (Black, 2011; Guo Quan Seng & Kwartanada, 2024; Irwin, 1957), sementara komunitas memanfaatkan komunikasi dan jejaringnya seperti yang dilakukan golongan Tionghoa Muslim di Indonesia (Raymon & Wijayati, 2025), baik dalam hal untuk memahami makna dari arsip sejarah, serta untuk menggali memori kolektif (Kwartanada, 2021). Salah satu contoh konkret adalah komunitas daring NGGOTIO yang berfokus pada edukasi sejarah dan identitas Tionghoa (Anshori et al., 2022). Melalui unggahan harian, diskusi virtual, dan kolaborasi dengan peneliti maupun seniman, NGGOTIO berhasil menghadirkan narasi alternatif yang tidak selalu tercatat dalam historiografi resmi. Konten yang mereka tampilkan mulai dari kisah tokoh lokal, sejarah kuliner, hingga pengalaman diaspora, berfungsi sebagai pengingat bahwa sejarah Tionghoa Indonesia tidak semata-mata milik arsip negara, tetapi juga milik komunitas. Praktik dan upaya semacam ini kemudian menjadi tren terutama ketika terjadi pandemi Covid di Indonesia.

Sementara akun Instagram @tionghoaindonesia menjadi contoh lain bagaimana media sosial digunakan sebagai “arsip hidup”. Unggahan mereka menghadirkan foto lama, cerita keluarga, serta catatan perayaan budaya yang terhubung langsung dengan pengalaman sehari-hari komunitas. Praktik ini memperlihatkan bahwa memori

kolektif dapat diwariskan melalui dokumen tertulis, visual dan interaksi digital yang bersifat partisipatif.

Berbeda dari museum fisik yang memiliki batas ruang dan waktu, platform seperti NGGOTIO dan @tionghoaindonesia memanfaatkan infrastruktur media sosial (Instagram, YouTube, dan TikTok) yang secara teknis dirancang berbasis partisipasi dan interaktivitas. Desain teknis ini memungkinkan terbentuknya ruang publik digital dalam beberapa aspek.

Pertama, fitur komentar dan diskusi terbuka memungkinkan terjadinya deliberasi antar pengguna. Setiap unggahan mengenai sejarah toko lama, perayaan budaya, atau tokoh Tionghoa Indonesia memicu respons berupa komentar, klarifikasi, tambahan informasi, hingga perdebatan ringan. Mekanisme ini menunjukkan memori kolektif bisa dinegosiasikan secara horizontal.

Kedua, fitur *repost*, *share*, dan *tagging* memperluas jangkauan memori kolektif ke luar komunitas inti. Algoritma platform seperti Instagram dan TikTok mendistribusikan konten berdasarkan interaksi (*likes*, *comments*, *shares*), sehingga arsip kultural Tionghoa Indonesia dapat menjangkau audiens lintas etnis dan generasi. Dalam hal ini desain algoritmik menjadi faktor penting dalam memperluas ruang publik digital.

Ketiga, arsitektur kronologis dan arsip permanen (*feed*, *highlight*, *playlist* YouTube) berfungsi sebagai repositori digital yang dapat diakses ulang. Konten terdokumentasi dan dapat dirujuk kembali. Hal ini menunjukkan pengarsipan berkelanjutan berbasis platform.

Keempat, format multimedia (teks, foto lama, video dokumenter pendek, siaran langsung) memungkinkan penyajian memori dalam bentuk yang terbuka dan mudah dipahami generasi muda. Fitur *live streaming* atau webinar daring (seperti diskusi komunitas) juga memperlihatkan adanya ruang dialog sinkron yang menyerupai forum publik digital.

Desain ruang publik digital ini tetap dipengaruhi oleh logika platform yang digunakan. Algoritma berbasis keterlibatan publik cenderung memprioritaskan konten yang populer, sehingga narasi yang kompleks atau sensitif berpotensi kurang terekspos. Selain itu, tidak adanya mekanisme kurasi akademik formal dapat menimbulkan risiko fragmentasi informasi.

Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini berperan sebagai media rekonstruksi identitas bagi generasi muda Tionghoa Indonesia. Di TikTok, misalnya, banyak anak muda yang membagikan resep tradisional keluarga, kisah leluhur yang selamat dari masa diskriminasi, atau cerita tentang kehidupan di Pecinan (Moh Atikurrahman, 2025). Di Instagram, arsip visual berupa foto toko tua atau rumah berarsitektur peranakan membantu merekam sejarah lokal yang mungkin tidak tercatat dalam arsip resmi. Sementara di YouTube, konten berbentuk dokumenter pendek dan vlog komunitas berfungsi sebagai ruang refleksi sejarah sekaligus hiburan yang dapat diakses lintas generasi (Raymon, 2025).

NGGOTIO dan @tionghoaindonesia berfungsi sebagai media penyebaran konten sejarah sekaligus sebagai ruang publik digital yang dimediasi teknologi antarmuka. Ruang ini bersifat partisipatif, terdistribusi, dan terbuka, meskipun tetap berada dalam kerangka kontrol algoritmik dan tata kelola privat perusahaan media sosial.

Media Sosial: Potensi dan Tantangan

Di masa kini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga media arsip yang dinamis, partisipatif, dan selalu diperbarui oleh komunitas. Namun perlu dicatat juga meskipun media sosial menghadirkan peluang besar bagi generasi muda Tionghoa Indonesia untuk membangun arsip hidup, terdapat sejumlah risiko yang perlu dicermati.

Platform seperti TikTok dan Instagram menggunakan algoritma berbasis engagement. Konten yang dianggap “viral” lebih mudah tersebar, sementara narasi historis yang kompleks dan mendalam sering kali tenggelam. Akibatnya, memori kolektif yang ditampilkan cenderung terfragmentasi atau memunculkan yang disebut bias algoritma, lebih menonjolkan aspek populer (kuliner, festival, budaya visual) ketimbang trauma kolektif atau peristiwa diskriminatif.

Konten sejarah dalam bentuk video pendek juga berisiko kehilangan kedalaman analisis. Misalnya, unggahan tentang kerusuhan Mei 1998 bisa direduksi menjadi sekadar tayangan dramatis tanpa penjelasan konteks sosial-politik, yang kemudian terlanjur disebarluaskan melalui berbagai grup WhatsApp. Hal ini dapat melahirkan kesalahpahaman.

Di satu sisi, budaya dan isu-isu Tionghoa Indonesia juga berpotensi dijadikan komoditas digital. Branding “keunikan” budaya Tionghoa dalam konten media sosial bisa menggeser fungsi arsip digital dari ruang rekonsiliasi menjadi sekadar konsumsi visual (Gulo & Octafian, 2024; Reviandani et al., 2023). Jika tidak dikelola hati-hati, hal ini justru mengulang pola komersialisasi identitas yang pernah dialami komunitas di ranah ekonomi (John Sydenham, 1944).

Media sosial memang memungkinkan penyebaran konten yang tidak selalu diverifikasi. Tanpa mekanisme kurasi, arsip digital yang lahir di platform bisa bercampur dengan mitos, stereotip, atau informasi keliru (Adhitama, 2025).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa arsip digital berfungsi sebagai mekanisme koreksi historiografi nasional melalui tiga proses empiris utama.

Pertama, keterbukaan akses terhadap sumber sejarah. Digitalisasi naskah Sino-Melayu, dokumentasi museum komunitas, dan arsip visual yang sebelumnya tersebar atau tersembunyi memungkinkan publik mengakses narasi sejarah Tionghoa yang tidak tercatat dalam arsip negara. Akses terbuka ini secara langsung memperluas basis sumber historiografi, sehingga mengurangi ketergantungan pada arsip resmi yang selama Orde Baru bersifat selektif dan eksklusif.

Kedua, redistribusi otoritas narasi sejarah. Melalui platform digital seperti NGGOTIO dan @tionghoaindonesia, komunitas menjadi produsen narasi. Fitur partisipatif seperti komentar, diskusi, dan berbagi ulang konten menunjukkan bahwa memori kolektif dinegosiasikan secara horizontal. Proses ini menunjukkan model kolaboratif berbasis komunitas.

Ketiga, rekontekstualisasi memori trauma dalam ruang publik digital. Dokumentasi peristiwa diskriminasi, kebijakan Orde Baru, dan kerusuhan Mei 1998 yang beredar dalam arsip digital memungkinkan pengalaman yang sebelumnya bersifat privat atau tertekan masuk ke dalam wacana publik yang lebih luas. Arsip digital berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi simbolik, di mana pengalaman marginal dapat diakui sebagai bagian dari sejarah nasional.

Temuan ini menegaskan bahwa arsip digital menjadi infrastruktur publik yang mampu

mengoreksi bias historiografi melalui perluasan sumber, partisipasi komunitas, dan sirkulasi memori alternatif. Koreksi terjadi dengan memperkaya dan memperluasnya secara empiris. Pemerintah dan akademisi perlu memandang arsip digital sebagai arena memori kolektif yang harus berpihak pada pluralisme sejarah. Integrasi narasi Tionghoa dalam kurikulum dan historiografi nasional sangat penting untuk membangun inklusivitas. Penciptaan ruang dialog antargenerasi yang mendorong kolaborasi lintas komunitas berkeadilan perlu dikelola.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kajian selanjutnya. Penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat partisipasi pengguna atau dampak jangka panjang terhadap perubahan persepsi publik. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana arsip digital benar-benar memengaruhi wacana historiografi nasional. Fokus penelitian ini juga belum mencakup seluruh ekosistem arsip digital Tionghoa Indonesia, termasuk inisiatif berbasis diaspora, arsip lokal di kota-kota kecil, maupun platform berbasis web independen di luar media sosial arus utama. Penelitian mendatang dapat melakukan studi komparatif lintas wilayah atau lintas negara untuk melihat bagaimana dinamika arsip digital berkembang dalam konteks sosial-politik yang berbeda.

Penelitian ini juga belum mendalami secara teknis aspek infrastruktur digital seperti tata kelola metadata, standar interoperabilitas arsip, keamanan data, serta kebijakan privasi platform. Kajian selanjutnya dapat memperdalam analisis sistemik terhadap pengelolaan arsip berbasis teknologi. Penekanan penelitian ini pada fungsi arsip digital sebagai ruang publik partisipatif, namun belum sepenuhnya mengeksplorasi potensi bias algoritma dan komersialisasi platform media sosial dalam membentuk distribusi narasi sejarah. Penelitian masa depan dapat menganalisis algoritma komersialisasi untuk memahami bagaimana struktur platform turut memengaruhi visibilitas memori kolektif.

Keterbatasan penelitian ini menegaskan bahwa studi mengenai arsip digital dan historiografi minoritas masih terbuka luas. Pengembangan metodologi yang lebih interdisipliner, integrasi analisis teknis sistem digital, serta eksplorasi dampak jangka panjang terhadap kebijakan publik akan memperkaya

pemahaman mengenai peran arsip digital dalam membangun historiografi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2024a). *Mengembalikan Tionghoa ke dalam historiografi Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Adam, A. W. (2024b). Pribumi, Minoritas Tionghoa dan China, by Leo Suryadinata. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 180(2–3), 307–309. <https://doi.org/10.1163/22134379-18002010>
- Adhitama, S. (2025). Analisis Representasi dan Cultural Universal Komunitas Etnis Tionghoa dalam Film *Apanya Dong* (1983). *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 5(3), 601–615. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v5i3.3452>
- Anshori, A., Cheung, A., Kwartanada, D., Sutrisno, E. L., Hasan, J., Andrew, M., Ravando, Aji, R. N. B., Rahayu, S. D. I. S., Giamsjah, S. S., Murtiyoso, S., & Wirawan, Y. (2022). *Tionghoa merajut keindonesiaan persembahan 80 tahun Leo Suryadinata*. Penerbit Universitas Ciputra.
- Black, G. (2011). Museums, Memory and History. *Cultural and Social History*, 8(3), 415–427. <https://doi.org/10.2752/147800411X13026260433275>
- Bunari Bunari, Rizki Ananda H, Yusninar Br. S, Muhammad Rafif, Asaroh Delawati, & Vini Agustine. (2025). Pelestarian Sejarah Lokal melalui Optimalisasi Fungsi Koleksi Museum: Pengabdian Masyarakat di Museum Sang Nila Utama. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 2(1), 09–20. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i1.1352>
- Cheung, A., Angelina, S., & Pradana, W. (2021). *Tionghoa di Quora*. CV. Penerbit Pemandar Ilmu.

- Coppel, C. A. (1994). *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Tim Penerjemah PSH (Penerbit Sinar Harapan/Stenly) (penerj.)). Pustaka Sinar Harapan .
- Dharmawanputra, B. (2025). Neglected Digital Archiving: An Ideological Critique Towards the Roadmap for Indonesian Education 2025-2045 and Cultural Sustainability. *Proceeding of International Joint Conference on UNESA*, 3(1), 302–314. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/ijcu/article/view/6383>
- Fadhila, M., & Adipurwawidjana, A. J. (2024). Narasi Orde Baru Dalam Cerpen-Cerpen Linda Christanty. *Metahumaniora*, 14(3), 222–231. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v14i3.45853>
- Go Gien Tjwan. (2020). *Tulisan Pilihan Dari Pengasingan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Goan, A. Y. (2009). *Memoar Ang Jan Goan*. Yayasan Nabil & Hasta Mitra.
- Gulo, Y., & Octafian, R. (2024). The Change of Millennial Tourist Interests in Sam Poo Kong Temple, Semarang. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 2(02), 275–274. <https://doi.org/10.59653/pancasila.v2i02.764>
- Guo Quan Seng, & Kwartanada, D. (2024). Chinese Businesses and the Batik Industry in Pekalongan. In *Batik Nyonyas: Three Generations of Art and Entrepreneurship – Nyonya Oeij Soen King, Nyonya Oeij Kok Sing, Jane Hendromartono* (hal. 114–121). Asian Civilization Museum.
- Irwin, J. (1957). Museums in Indonesia. *Museum International*, 10(4), 273–279. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0033.1957.tb00067.x>
- John Sydenham, F. (1944). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.
- Juniati, J., & Nurdiansyah, A. (2023). Pola Pengelolaan Arsip Secara Digital dalam Mendukung Efektivitas Organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5448>
- Kaparang, M. E. P., Everlin, S., & Eva, A. T. (2023). Buku Dokumentasi Fotografi “Kelenteng Boen San Bio.” *Jurnal Bahasa Rupa*, 6(2), 180–190. <https://doi.org/10.31598/bahasarupa.v6i2.1197>
- Kerman, S. (2006). Climbing the Limitless Mountain: Daoism and the Internal Martial Arts. *Independent Study Project (ISP) Collection*, 297. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/297/
- Khaled Benfafa. (2025). Intangible cultural heritage: conceptual dilemmas between the immaterial and the cultural. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 2(46). [https://doi.org/10.31435/ijitss.2\(46\).2025.3294](https://doi.org/10.31435/ijitss.2(46).2025.3294)
- Kristiono, M. (2018). Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah Sejarah terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa di Indonesia [From Tionghoa to China: A Historical Review of the Demonization of Chinese Ethnicity in Indonesia]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(19), 34. <https://doi.org/10.19166/verity.v10i19.1309>
- Kuntjara, E., & Hoon, C.-Y. (2020). Reassessing Chinese Indonesian stereotypes: two decades after *Reformasi*. *South East Asia Research*, 28(2), 199–216. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1729664>
- Kurniawan, H., Supriatna, N., & Mulyana, A. (2023). Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia pada Materi Masa Hindu-Buddha: Analisis Wacana Kritis. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 127–136.

- <https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.56182>
- Kwartanada, D. (2016). The Papers that Surveilled: Identity Cards and Suspicion of the Chinese. In *Gazing on Identity/Menerawang Identitas* (hal. 5–14). ARNDT Fine Art. Singapore.
- Kwartanada, D. (2020a). Diingat sekaligus dihapuskan: “Cina” dalam memori kolektif dan historiografi orde baru. *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 39(2), 12–33.
- Kwartanada, D. (2020b). Membuat “Buah Simalakama” Aman dan Nikmat disantap: Etnik Tionghoa, Peran Kebangsaan, dan Tantangannya. In *Dilema Minoritas di Indonesia*.
- Kwartanada, D. (2021). The Making of the “Chinese Problem”: Indonesian Local Agencies’ Perceptions of Ethnic Chinese and Communist China, 1950-1979. *Lembaran Sejarah*, 16(2), 183. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.66958>
- Lázaro Ortiz, S., & Jiménez de Madariaga, C. (2022). The UNESCO convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage: a critical analysis. *International Journal of Cultural Policy*, 28(3), 327–341. <https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1941914>
- Liji, L. (2012). *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis* (N. Subagio & T. E. Muas (ed.)). Kompas.
- Marching, S. T. (2017). *The End of Silence*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1017/9789048534364>
- McDougall, J., Readman, M., & Wilkinson, P. (2018). The uses of (digital) literacy. *Learning, Media and Technology*, 43(3), 263–279. <https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1462206>
- Meij, L. S. (2009). *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moh Atikurrahman. (2025). Reimagining textuality: Digital convergence and literary adaptation in Indonesia. *Lingua Technica: Journal of Digital Literary Studies*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.64595/lingtech.v1i1.30>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Permatadewi, R., & Gunawan, T. (2023). Jejak Historis Klenteng Boen Tek Bio Sebagai Cagar Budaya Warisan Etnis Tionghoa Di Tangerang. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(1), 137–163. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.23>
- Pranoto, N. (1998). *Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pratama, A. (2016). Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia. *JIPP (Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan)*, 2(2), 214–229. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/ADHKPRTM>
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Penerbit Ombak.
- Purwanto, B. (2019). *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis* (M. Nursam (ed.)). Ombak.
- Raymon, A. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pengayoman Komunitas Tionghoa Mualaf Di Masjid Lautze. *IJSTECH: Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.60076/ijstech.v3i1.1285>
- Raymon, A., & Wijayati, P. A. (2025). Oei Tjeng Hien dan Masjid Lautze: Politik Identitas Tionghoa Muslim. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 9(2), 322–335. <https://doi.org/10.29408/fhs.v9i2.31495>

- Reviandani, O., Hardjati, S., Harmawan, B. N., & dkk. (2023). *Governance Di Era Digital: Isu-Isu Kontemporer*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Samtani, H. (2023). Diaspora etnis tionghoa dan memori penderitaan tragedi mei 1998 dalam cerpen nyonya rumah abu karangan vika kurniawati. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 96–103. <https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.323>
- Santosa, I. (2014). *Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara sampai Indonesia* (D. Kwartanada (ed.)). Kompas dan Yayasan Nabil.
- Setijadi, C. (2016). ‘A Beautiful Bridge’: Chinese Indonesian Associations, Social Capital and Strategic Identification in a New Era of China–Indonesia Relations. *Journal of Contemporary China*, 25(102), 822–835. <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1184895>
- Setiono, B. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. TransMedia Pustaka.
- Show, Y. X., & Sai, S.-M. (2023). Reassessing the Chinese diaspora from the South: history, culture and narrative. *Inter-Asia Cultural Studies*, 24(4), 577–584. <https://doi.org/10.1080/14649373.2023.2221489>
- Sinaga, L. C., Kusumaningtyas, A. N., & Rozi, S. (2024). ‘TIONGHOA’ OR ‘CINA’: negotiating Chinese-Indonesians’ preferred identity in the post-reform era. *Asian Ethnicity*, 25(2), 340–366. <https://doi.org/10.1080/14631369.2023.2257615>
- Suryadinata, L. (1994). *Politik Tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942* (F. . Hardoyo (penerj.)). Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, L. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Kompas.
- Suryadinata, L. (2023). *Pribumi, Minoritas Tionghoa dan China*. Kompas.
- Sutrisno, K. K., & Tumimomor, A. Y. M. (2017). *Perancangan Video Dokumenter Kelenteng Hok An Kiong Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sya’bani, A. M., Sujana, M. M. A. P., Gymnastiar, S. A.-H., Afifah, A. N., & Nugraha, D. M. (2024). Dalam Bayangan: “Mei 1998.” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 673–679. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1925>
- Yulianni. (2025). Perancangan Desain Graphic Print Kartu Ceki dalam Upaya Revitalisasi Budaya Cina Benteng. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 6(1), 80–94. <https://doi.org/10.33153/citrawira.v6i1.7144>